

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu kota selain berdampak positif terhadap kegiatan perekonomian kota juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pembangunan kota adalah semakin kompleksnya permasalahan pengelolaan persampahan kota. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas perkotaan, maka sampah muncul sebagai masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Penanganan dan pengelolaan seperti masih banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan baik, salah satunya dikarenakan kebijakan atau program pengelolannya yang kurang terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat, baik dunia usaha maupun masyarakat umum.

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan belum optimal yang diberikan oleh pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warganya. Pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tetap berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup diupayakan seminimal mungkin. Jalan keluar terhadap pengelolaan sampah yang baik dilakukan secara garis besar melalui pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif mulai dari hulu hingghilir termasuk kepada dampak yang mungkin timbul di dalamnya.

Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit (Nuryani, 2003 :56). Meningkatnya jumlah sampah tidak diimbangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengusahakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Di samping itu, kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sampah juga belum mencapai hasil yang optimal, terlihat dari adanya dampak yang ditimbulkan dari sampah yang semakin hari semakin menumpuk. Oleh karena itu, jika tidak tertangani dengan baik maka pada masa

mendatang sampah akan menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan timbulan sampah seperti jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi serta kemajuan teknologi yang diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan (Slamet, 2000).

Studi kasus yang dilakukan oleh Prihatin RB (2020) tentang “Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta”, menunjukkan bahwa Pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah populasi umumnya menimbulkan masalah di daerah perkotaan, yang di antaranya adalah timbulnya sampah. Studi ini difokuskan pada persiapan kota-kota ini untuk mengantisipasi munculnya masalah sampah di masa depan ketika mereka menuju dan menjadi kota besar (populasi di atas 1.000.000). Menggunakan wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku bisnis bank sampah di dua kota tersebut, dan melalui pengamatan langsung, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan sampah di kedua kota masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, kemudian diangkut secepat mungkin, dan setelah itu dibuang sejauh mungkin. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pengolahan sampah di TPA masih dilakukan dengan mekanisme *open dumping* atau sampah hanya ditumpuk terbuka tanpa ada pengelolaan khusus.

Studi kasus yang dilakukan oleh Hartono (2020) tentang “Analisis Inovasi Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan Di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi pada tahun 2020”, juga menyebutkan bahwa perkiraan timbunan sampah rumah tangga yang dihasilkan mencapai 6.750 m³/hari atau berkisar 1.500 ton per hari dimana dengan frekwensi pengangkutan sampah rumah tangga adalah 2 kali dalam seminggu, jumlah sampah terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng setiap harinya hanya sebanyak 4.252,6 m³ atau setara dengan 800 Ton. Artinya masih banyak sampah tertinggal dan tidak terangkut ke TPA Burangkeng. Sumber sampah yang dominan berasal dari sampah rumah tangga (permukiman), yaitu mencapai 62% dari total jumlah sampah yang dihasilkan. Selain masalah volume sampah yang terus meningkat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi saat ini juga menghadapi berbagai persoalan terkait penanganan sampah, berupa keterbatasan biaya operasional dan sarana prasarana pengelolaannya serta kondisi TPA Burangkeng milik Kabupaten Bekasi dengan luas sekitar 11 hektar sangat overload. Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008, Pemda Kabupaten Bekasi

mengeluarkan inovasinya berupa Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) melalui pemberdayaan Bank Sampah di setiap kelurahan/desa melalui RW – RW yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto Mokodompis dkk (2019) mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Mando” juga menyatakan bahwa terjadi peningkatan kualifikasi timbulan sampah sebesar 2% dari tahun 2013 ke 2014, dan terjadi peningkatan besar yaitu sebesar 19% dari tahun 2013 ke tahun 2017 dengan angka 828.812 meter kubik menjadi 980.865 meter kubik.

Kota Jambi juga mengalami permasalahan dalam penanganan masalah persampahan. Data di bidang kebersihan diketahui bahwa timbulan sampah di Kota Jambi baik sampah organik maupun sampah non organik mencapai 119,91 ton/hari yang dihasilkan dari penduduk baik di perumahan, sarana perdagangan, pasar, permukiman yang bertebaran di berbagai sudut kota dan dari jumlah tersebut hanya sebagian saja yang dapat diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), selebihnya dibakar, ditanam, dibuang ke sungai, dan sebagian lainnya dikelola masyarakat namun lebih banyak tidak tertangani dengan baik karena kurangnya kendaraan/gerobak sampah khusus untuk angkutan sampah perumahan dan minimnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kebersihan. Data dari DLH Provinsi Jambi pada tahun 2022 menunjukkan jumlah timbulan sampah untuk Provinsi Jambi sebanyak 352.404,44 Ton, yang terkelola sebesar 281.940,96 Ton, dan yang tidak terkelola sebesar 70.543,48 Ton. Sedangkan Kota Jambi memiliki sampah yang terkelola sebanyak 155.565,29 Ton, dan yang tidak terkelola sebesar 4.121,72 Ton.

Pembuangan akhir sampah yang ada di Kota Jambi adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sanitary Landfill Talang Gulo yang terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi yang berjarak kurang lebih 15 Km dari pusat Kota Jambi. Luas TPA ini mencapai sekitar 10 hektare dan sudah beroperasi sejak tahun 1997, (Kementrian PUPR). Berdasarkan data DLH provinsi Jambi tahun 2022, sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo sebesar 119.173,96 Ton dan yang di proses masuk ke landfill sebesar 118.261,46 Ton. Pada tahun 2035 di prediksi akan mengalami peningkatan sebesar 10% menjadi 128.239,10 Ton.

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan Jambi akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara

lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulah sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraanpersonil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Pada umumnya, laju produksi sampah lebih cepat dari upaya penanggulangannya. Keadaan ini menjadikan program penanggulangan sampah dan kebersihan kota Jambi sebagai salah satu prioritas utama. Target dan capaian Pengelolaan sampah di Kota Jambi pada tahun 2022, timbulan sampah sebanyak 159.688,01 Ton, pengurangan sampah sebanyak 35.843,83 Ton dan penanganan sampah di Kota Jambi sebanyak 119.721,46 Ton.

Pengelolaan dikatakan optimal bila semua aspek dari pengelolaan berjalan seimbang dan saling menunjang. Terkait dengan penanganan persampahan, pengelolaan sampah terdiri dari beberapa aspek, diantaranya aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis dan operasional serta peran serta masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, maka akan berimplikasi pada berbagai persoalan lain yang diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran sampah tersebut. Dampak penurunan kualitas lingkungan seperti yang dikemukakan Yunus (2008) mulai dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu dengan terjadinya gejala penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh peningkatan polusi udara, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi tanah, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi air, dan penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh kerusakan lahan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi no 5 tahun 2020 Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk menjadikan Kota Jambi memiliki lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, dan juga turut menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjaga kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien serta meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah dilakukam berdasarkan nilai tanggung jawab, nilai kesadaran, nilai kebersamaan, dan nilai ekonomi.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2014 yang diterbitkan setiap lima tahun itu dapat diketahui dari Persentase Cara Pengelolaan Sampah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Diketahui pengelolaan sampah masih didominasi dengan cara dibakar 60,5 persen, diangkut oleh petugas sebanyak 18,4 persen, dibuang ke parit/kali/laut sebanyak 11,2 persen, ditimbun dalam tanah 6 persen, dibuang sembarangan 3,7 persen

dan dibuat kompos hanya 0,3 persen.

Menurut SNI 19-3964-1995 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, jumlah sampah dari sektor permukiman diasumsi berkontribusi 65% dan sektor non-permukiman diasumsi berkontribusi 35% dari total sampah. Komponen sampah yang sering dihasilkan dalam rumah tangga terdapat dalam Tabel 1.1 (Widiarti, 2012 : 104):

Tabel 1. 1 Sampah Padat dalam Rumah Tangga

Sampah Organik	Sampah Anorganik	Limbah B3
Sisa makanan	Kertas (hvs putih, koran, karton, kardus, potongan kertas berwarna)	Batu baterai
Sampah dapur	Plastik (kresek, wadah, kemasan, botol)	Wadah/kemasan (parfum, spray, pembersih lantai)
Sampah sapuan halaman	Kaca (piring, botol) Logam Kain	Lampu/bohlam neon

Sumber: Widiarti (2012)

Produksi sampah yang dihasilkan dari Kota Jambi pada tahun 2020 mencapai 427.625,39 kg/hari atau 1.425,42 m³/hari dengan jumlah penduduk 610.893 jiwa, rata-rata 0,7 kg/jiwa/hari. Produksi sampah yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis kegiatan. Pada tahun 2017-2020 terlihat bahwa produksi sampah mengalami peningkatan dan penurunan seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan jika peningkatan produksi sampah tidak diiringi dengan peningkatan pengelolaan sampah. Data untuk timbulan dan volume sampah yang diproduksi di Kota Jambi dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini (Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2021):

Tabel 1. 2 Timbulan dan Volume Sampah Kota Jambi Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (kg/hari)	Volume Sampah (m³/hari)
2017	591.340	461.245,10	1.537,48
2018	597.043	465.693,81	1.552,31
2019	597.043	465.693,81	1.552,31
2020	610.893	427.625,39	1.425,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (2021)

Tabel 1. 3 Timbulan dan Volume Sampah Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total Sampah (kg/hari)	Total Sampah (m³/hari)
Kota Baru	78.818	55.172,68	183,91
Alam Barajo	98.921	69.244,65	230,82
Jambi Selatan	63.797	44.657,56	148,86
Paal Merah	92.685	64.879,17	216,26
Jelutung	65.660	45.961,84	153,21
Pasar Jambi	13.107	9.175,03	30,58
Telanaipura	52.158	36.510,33	121,70
Danau Sipin	49.827	34.878,74	116,26
Danau Teluk	12.563	8.793,99	29,31
Pelayangan	14.059	9.841,14	32,80
Jambi Timur	69.300	48.510,25	161,70
Jumlah	610.893	427.625,39	1.425,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (2021)

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah, idealnya setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah ke TPS atau Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengangkutan ke TPA, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008: Pengelolaan Sampah, 2008 : 10-15). Harus dilakukan kegiatan pengelolaan sampah dikarenakan seiring berjalannya waktu ada penambahan penduduk dan peningkatan pola konsumsi masyarakat, jika hanya mengandalkan TPA, TPA kapasitasnya terbatas.

Jika dibandingkan dengan peraturan tersebut, hal ini tidak sejalan dengan kondisi eksisting pengelolaan sampah padat khususnya rumah tangga di beberapa kecamatan di Kota Jambi, karena berdasarkan studi lapangan pengelolaan sampah padat rumah tangga di beberapa kecamatan, masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*) yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPS dan TPA oleh masyarakat serta petugas kebersihan sampah. Selain itu, ditemukan masyarakat di beberapa kecamatan yang memiliki tempat tinggal dengan bentuk bangunan menggunakan pondasi tiang kayu memiliki budaya membuang sampah ke bawah rumahnya, hal ini dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus serta masih terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan di sungai, sampah-sampah yang tidak terkelola ini dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan berupa pencemaran air, tanah, udara, dan kesehatan jika dilakukan secara terus-menerus.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan sampah di Kota Jambi dinilai kurang baik. Uraian singkat diatas memberikan sebuah pemahaman bahwa perlu adanya pengelolaan sampah secara baik dan benar di Kota Jambi untuk mengantisipasi berbagai persoalan lain yang muncul akibat pencemaran sampah. Harapannya, kinerja pengelolaan sampah di Kota Jambi menjadi lebih baik dan dapat berdampak positif terhadap kualitas lingkungan yang ada di Kota Jambi. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian mengenai kinerja pengelolaan sampah dan pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan di Kota Jambi serta strategi dan teknologi seperti apa yang dapat diterapkan dalam pengelolaan persampahan di Kota Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah existing pengelolaan sampah di Kota Jambi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Jambi?
3. Bagaimanakah strategi pengelolaan sampah di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu untuk mengkaji:

1. Mendeskripsikan kondisi existing pengelolaan sampah di Kota Jambi.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Jambi.
3. Menentukan strategi yang tepat untuk pengelolaan sampah di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Akademik

Sebagai karya ilmiah terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau referensi bagi penelitian Strategi Pengelolaan Persampahan Kota Jambi.

1.4.2 Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan masukan untuk Kegiatan Pengelolaan Persampahan di Kota Jambi.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dimasyarakat agar tetap menjaga sanitasi dalam lingkungan kehidupan. Serta menambah pengetahuan masyarakat khususnya dalam menjaga Sanitasi lingkungan dan meningkatkan derajat kesehatan di dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat.